



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Jl. Mayjend Sutoyo No. 29 - 31 Purworejo Kode Pos 54114
Telp (0275) 321404 Facsimile (0275) 321015
E-mail: dkpp@purworejakab.go.id. Website: <https://dkpp.purworejakab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR: 500.6.1/4815/2024

TENTANG

MANAJEMEN RISIKO
DI LINGKUNGAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN PURWOREJO

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
KABUPATEN PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo, diperlukan Manajemen Risiko untuk mengelola risiko-risiko yang dihadapi;
- b. bahwa dalam rangka pengelolaan Manajemen Risiko sebagaimana dalam huruf a, diperlukan dokumen Manajemen Risiko sebagai arah pelaksanaan pengelolaan risiko-risiko yang kemungkinan terjadi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4890);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4);
7. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 116 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Nomor 116 Seri E Nomor 103).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN PURWOREJO.

PERTAMA : Manajemen Risiko di Lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo dilaksanakan sesuai dengan dokumen Manajemen Risiko sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo ini.

KEDUA : Dokumen Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama merupakan acuan dalam pengelolaan Manajemen Risiko di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo.

KETIGA : Pengelolaan Risiko pada lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo dilakukan atas risiko strategis dan risiko operasional Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo.

KEEMPAT : 1. Dalam melaksanakan pengelolaan Manajemen Risiko di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo dibantu oleh Unit Pemilik Risiko (UPR) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo.
2. Pengelolaan risiko pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo dilakukan melalui:

- a. Pengembangan budaya sadar risiko;
- b. Pembentukan struktur pengelolaan risiko;
- c. Penyelenggaraan proses pengelolaan risiko.

- KELIMA : Dokumen Manajemen Risiko meliputi:
- a. Penetapan Konteks Risiko Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1;
 - b. Penetapan Konteks Risiko Operasional Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2;
 - c. Identifikasi Risiko Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3;
 - d. Identifikasi Risiko Operasional Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4;
 - e. Hasil Analisis Risiko Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo sebagaimana tercantum dalam Lampiran 5;
 - f. Matriks Analisis Risiko Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo sebagaimana tercantum dalam Lampiran 6;
 - g. Daftar Risiko Prioritas Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo sebagaimana tercantum dalam Lampiran 7;
 - h. Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang ada dan masih dibutuhkan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo sebagaimana tercantum dalam Lampiran 8;
 - i. Pengkomunikasian pengendalian yang dibangun Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo sebagaimana tercantum dalam Lampiran 9;
 - j. Rancangan Pemantauan atas Pengendalian Intern Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo sebagaimana tercantum dalam Lampiran 10;
 - k. Pencatatan Kejadian Risiko (*Risk Even*) dan RTP Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo sebagaimana tercantum dalam Lampiran 11.
- KEENAM : Dalam menentukan risiko prioritas, digunakan matrik risiko sebagaimana lampiran 6.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purworejo
Pada tanggal : 21 Juli 2024

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN KABUPATEN PURWOREJO



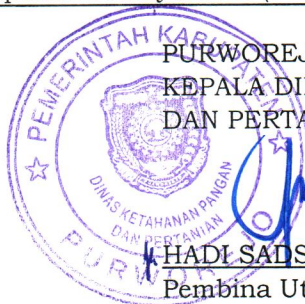
HADI SADSILA, S.P., M.M.
Pembina Utama Muda / IV c
NIP 196805051997031008

LAMPIRAN 1
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN
 PANGAN DAN KETAHANAN PANGAN
 NOMOR : 500.6.1 / 4819 / 2024
 TANGGAL : 21 Juli 2024
 TENTANG
 MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN DINAS
 KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
 KABUPATEN PURWOREJO

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS

Nama Pemda	: Kabupaten Purworejo	
Tahun Penilaian	: 2024	
Periode yang dinilai	: 2021 - 2026	
Urusan Pemerintahan	: Bidang Pangan; Bidang Pertanian	
OPD yang Dinilai	: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo	
Sumber Data	: Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo	
Tujuan Strategis	: 1. Pemantapan Ketahanan Pangan 2. Peningkatan Kesejahteraan Petani 3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	
Sasaran Strategis	: 1. Meningkatnya Ketersediaan Pangan 2. Meningkatnya Produksi Pertanian 3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	
IKU Renstra OPD	IKU	2026
	1. Ketersediaan Pangan Utama	252 kg/kapita
	2. Persentase Kenaikan Produksi Pertanian	1.25%
	3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	83.00
Informasi lain	-	
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	: Tujuan Strategis	
	1. Pemantapan Ketahanan Pangan	
	2. Peningkatan Kesejahteraan Petani	
	3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	
	Sasaran Strategis	
	1. Meningkatnya Ketersediaan Pangan	
	2. Meningkatnya Produksi Pertanian	
	3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	
	IKU	
	1. Ketersediaan Pangan Utama	
	2. Persentase Kenaikan Produksi Pertanian	
	3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	

PURWOREJO, 21 JULI 2024
 KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
 DAN PERTANIAN KABUPATEN PURWOREJO



HADI SADSILA, SP., MM.
 Pembina Utama Muda / IV c
 NIP 196805051997031008

LAMPIRAN 2
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN
 PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN
 NOMOR : 900.6.1/4815/2024
 TANGGAL : 21 Juli 2024
 TENTANG
 MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN DINAS
 KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
 KABUPATEN PURWOREJO

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL

Nama Pemda	: Kabupaten Purworejo
Tahun Penilaian	: 2024
Periode yang dinilai	: 2021 - 2026
Urusan Pemerintahan	: Bidang Pangan; Bidang Pertanian
OPD yang Dinilai	: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo
Sumber Data	: Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2024
Tujuan Strategis	: 1. Pemantapan Ketahanan Pangan 2. Peningkatan Kesejahteraan Petani 3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Program Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo (Renja 2024) dan Kegiatan Utama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota <ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah b. Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah d. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah e. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah f. Administrasi Umum Perangkat Daerah g. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah h. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah i. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan 2. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan <ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah kabupaten/ Kota 3. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat <ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan b. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi 4. Program Penanganan Kerawanan Pangan <ol style="list-style-type: none"> a. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/ Kota 5. Program Pengawasan Keamanan Pangan <ol style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota 6. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian <ol style="list-style-type: none"> a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian b. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota c. Penyediaan Benih/ Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Lain 7. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian <ol style="list-style-type: none"> a. Pembangunan Prasarana Pertanian b. Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/ Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota

	8. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner <ul style="list-style-type: none"> a. Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/ Kota b. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/ Kota c. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner 9. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian <ul style="list-style-type: none"> a. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota 10. Program Perizinan Usaha Pertanian <ul style="list-style-type: none"> a. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota 11. Program Penyuluhan Pertanian <ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 		
Keluaran/ Hasil Kegiatan	Program/ Kegiatan	Indikator Keluaran	
	1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	100%
	a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 dokumen
	b. Administrasi Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%
	c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	100%
	d. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100%
	e. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%
	f. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%
	g. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan	1 unit
	h. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan	2 laporan
	i. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara	5 jenis
	2. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Infrastruktur yang Disediakan	60%
	a. Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah kabupaten/ Kota	Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	1 unit

3.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Ketersediaan Pangan Utama	100%
	a. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Dokumen Ketersediaan Pangan yang disusun	1 dokumen
	b. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Pemenuhan Konsumsi Pangan yang Beragam dan Bergizi Seimbang yang Dilaksanakan	5 kelompok
4.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Penanganan pada Daerah Rawan/ Rentan Pangan	20.00%
	a. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kerawanan Pangan yang Ditangani	1 desa
5.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar Aman	100%
	a. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota	Data Pengawasan Pangan Segar yang Tersedia	1 dokumen
6.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Penyediaan Sarana Pertanian bagi Kelompok Tani	90%
	a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian yang Dilaksanakan	1 dokumen
	b. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	Sumber Daya Genetik (SDG) yang Dikelola	1 dokumen
	c. Penyediaan Benih/ Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Lain	Penyediaan Benih/ Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Lain yang Dilaksanakan	1 dokumen
7.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Penyediaan Prasarana Pertanian bagi Kelompok Tani	60%
	a. Pengembangan Prasarana Pertanian	Dokumen Pengembangan Prasarana Pertanian yang Disusun	1 dokumen
	b. Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian yang Dilaksanakan	90 unit
	c. Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/ Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Wilayah Sumber Bibit Kambing Kaligesing yang Dikelola	12 bulan

8.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	16%
	a. Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/ Kota	Laporan Hasil Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan	1 dokumen
	b. Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Layanan Jasa Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner	16 kecamatan
	c. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Laporan Hasil Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	2 dokumen
9.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Fasilitasi Pengendalian dan Penanggulangan Bencana OPT	100%
	a. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian yang Dilaksanakan	1 laporan
10.	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Jumlah Usulan Izin Usaha Pertanian	100%
	a. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Fasilitasi Rekomendasi Perizinan Usaha Pertanian	1 dokumen
11.	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Kenaikan Jumlah Petani Milenial	60%
	a. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Penyuluhan Pertanian yang Dilaksanakan	16 kecamatan
Informasi Lain	-		
Kegiatan dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko	Kegiatan/ Subkegiatan		Indikator Keluaran
	1.	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Dokumen Ketersediaan Pangan yang disusun
	a.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya
	b.	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan
	c.	Penyusunan Neraca Bahan Pangan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Pangan (NBM)
			1 dokumen
			1 laporan
			1 dokumen
			1 dokumen

2.	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Pemenuhan Konsumsi Pangan yang Beragam dan Bergizi Seimbang yang Dilaksanakan	5 kelompok
	a. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 laporan
3.	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kerawanan Pangan yang Ditangani	1 desa
	a. Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/ Kota	1 laporan
4.	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Data Pengawasan Pangan Segar yang Tersedia	1 dokumen
	a. Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	1 dokumen
	b. Penyediaan Sarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	1 dokumen
	c. Penguatan Kelembagaan Pengawas Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah Dokumen Penguatan Kelembagaan Pengawas Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	1 dokumen
5.	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian yang Dilaksanakan	1 dokumen
	a. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 laporan
	b. Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 laporan
6.	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota	Sumber Daya Genetik (SDG) yang dikelola	1 dokumen
	a. Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman	1 dokumen
	b. Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Jumlah SDG Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	1 laporan

7.	Penyediaan Benih/ Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota Lain	Penyediaan Benih/ Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota Lain yang Dilaksanakan	1 dokumen
	a. Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain	Jumlah Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	977 ekor
8.	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian yang Dilaksanakan	90 unit
	a. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	56 unit
	b. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 unit
	c. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	17 unit
	d. Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara serta Beroperasi	2 unit
9.	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/ Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Wilayah Sumber Bibit Kambing Kaligesing yang Dikelola	12 bulan
	a. Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/ Galur Ternak	Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/ Galur Ternak	1 laporan
10.	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Layanan Jasa Medik Veteriner dan Paramedik Veteriner	16 kecamatan
	a. Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	1 laporan
11.	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Laporan Hasil Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	2 dokumen
	a. Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	1 laporan
12.	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian yang Dilaksanakan	1 laporan
	a. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	450 ha

13.	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Penyuluhan Pertanian yang Dilaksanakan	16 kecamatan
	a. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	16 unit
	b. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2512 unit
	c. Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	5 unit



PURWOREJO, 21 JULI 2024

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN KABUPATEN PURWOREJO

HADI SADSILA, SP., MM.

Pembina Utama Muda / IV c

NIP 196805051997031008

LAMPIRAN 3
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
 DAN PERTANIAN KABUPATEN PURWOREJO
 NOMOR : 500.6.1/4815/2024
 TANGGAL : 21 Juli 2024
 TENTANG MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN
 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
 KABUPATEN PURWOREJO


IDENTIFIKASI RISIKO STRATEGIS

Nama Pemda : Kabupaten Purworejo
 Nama OPD : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
 Tahun Penilaian : 2024
 Periode yang dinilai : 2021-2026
 Tujuan Strategis : 1. Pemantapan Ketahanan Pangan
 2. Peningkatan Kesejahteraan Petani
 3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
 Urusan Pemerintahan : Bidang Pangan; Bidang Pertanian
 OPD yang Dinilai : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC	Dampak		
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian		Sumber	Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Pemantapan Ketahanan Pangan Meningkatkan Ketersediaan Pangan	Ketersediaan pangan utama	Menurunnya produksi pangan	RSO.24.09.13.01	Kepala DKPP	Pendampingan Petugas (PPL dan POPT) belum optimal Keterbatasan dukungan anggaran Pengendalian hama dan penyakit belum optimal Penyediaan sarana dan prasarana masih belum maksimal	Internal Internal Internal Internal	C C C C	1. Inflasi tinggi 2. Ketidakcukupan ketersediaan pangan di masyarakat 3. Reputasi dinas menurun karena adanya keluhan di masyarakat 4. Timbul gejala sosial di masyarakat	1. Masyarakat 2. Dinas

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab			C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
						Adanya alih fungsi lahan pertanian Ketersediaan pupuk bersubsidi tidak sesuai kebutuhan	Internal Eksternal	C UC		
2	Peningkatan Kesejahteraan Petani Meningkatnya Produksi Pertanian	Persentase kenaikan produksi pertanian	Menurunnya luas panen komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	RSO.24.27.26.01	Kepala DKPP	Pendampingan Petugas (PPL dan POPT) belum optimal Keterbatasan dukungan anggaran Pengendalian serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) kurang maksimal karena keterbatasan petugas dan obat-obatan serta animo masyarakat kurang antusias Keterbatasan operator Alat Mesin Pertanian (Alsintan) Luas tanam komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan menurun Adanya alih fungsi lahan pertanian Adanya anomali iklim Adanya serangan hama penyakit tanaman	Internal Internal Internal Internal Internal Internal	C C C C C C	1. Pendapatan petani menurun 2. Target produksi pertanian tidak tercapai 3. Reputasi dinas menurun karena adanya keluhan di masyarakat 4. Timbul gejala sosial di masyarakat	1. Masyarakat 2. Dinas

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko		Sebab		C/UC	Dampak		
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian		Sumber	Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
			Menurunnya populasi ternak	RSO.24.27.26.02	Kepala DKPP	Adanya bencana pertanian (banjir, tanah longsor, kekeringan)	Eksternal	UC		
						Keterbatasan jumlah petugas (dokter hewan, paramedik, inseminator)	Internal	C	1. Pendapatan peternak menurun 2. Target produksi peternakan tidak tercapai 3. Reputasi dinas menurun karena adanya keluhan di masyarakat 4. Timbul gejala sosial di masyarakat	1. Masyarakat 2. Dinas
						Keterbatasan dukungan anggaran	Internal	C		
						Pengendalian penyakit hewan menular kurang optimal	Internal	C		
						Sarana dan prasarana sektor peternakan kurang memadai	Internal	C		
						Ketersediaan bibit ternak kurang mencukupi	Internal	C		
						Arus lalu lintas ternak ke luar daerah cukup tinggi	Internal	C		
						Adanya penyakit hewan	Eksternal	UC		
						Adanya anomali iklim	Eksternal	UC		



PURWOREJO, 21 JULI 2024
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN KABUPATEN PURWOREJO
HADI SADSILA, SP., MM.
 Pembina Utama Muda / IV c
 NIP 196805051997031008

IDENTIFIKASI RISIKO OPERASIONAL

Nama Pemda : Kabupaten Purworejo
 Nama OPD : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
 Tahun Penilaian : 2024
 Periode yang dinilai : 2021-2026
 Tujuan Strategis : 1. Pemantapan Ketahanan Pangan
 2. Peningkatan Kesejahteraan Petani
 3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
 Sasaran strategis OPD : 1. Meningkatkan Ketersediaan Pangan
 2. Meningkatkan Produksi Pertanian
 3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik
 Urusan Pemerintahan : Bidang Pangan; Bidang Pertanian
 OPD yang Dimilai : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

No	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Sebab*		C/UC	Dampak**	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian		Sumber	Uraian
1	a b Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	c Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	d Pelaksanaan	e Pelaksanaan distribusi pangan tidak optimal	f ROO.24.09.13.01	g Kepala Bidang Pangan	h Tidak semua stakeholder hadir dalam pertemuan pembahasan distribusi pangan	i Internal	k Kebijakan yang diambil kurang tepat	l Dinas dan Masyarakat
2	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	Pelaksanaan	Responden pemberi informasi harga dan stok pangan tidak menginformasikan harga dengan tepat	ROO.24.09.13.02	Kepala Bidang Pangan	Blangko isian tidak mudah dipahami	Internal	Data yang diperoleh kurang valid	Dinas dan Masyarakat
3	Penyusunan Neraca Bahan Pangan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	Pelaksanaan	Data pendukung penyusunan dokumen NBM tidak lengkap	ROO.24.09.13.03	Kepala Bidang Pangan	Tidak semua data tersedia	Eksternal	Dokumen yang dihasilkan kurang tepat dipergunakan untuk pengambilan keputusan	Dinas dan Masyarakat
4	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penggerakaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penggerakaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pelaksanaan	Sosialisasi B2SA tidak berjalan lancar	ROO.24.09.13.04	Kepala Bidang Pangan	Materi sosialisasi kurang dimengerti peserta	Internal	Tidak terjadi perubahan pola pangan masyarakat	Dinas dan Masyarakat

No	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)			C/UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Resiko	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian		Pihak yang Terkena	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	
5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/ Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/ kota	Pelaksanaan	Belum semua desa rentan rawan pangan mendapat intervensi kegiatan	ROO.24.09.13.05	Kepala Bidang Pangan	Keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan	Internal	C	Penanganan kerawanan pangan tidak menasar ke semua desa rentan rawan pangan	Dinas dan Masyarakat	
6	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan	Pelaku usaha belum mempunyai kesadaran untuk melakukan registrasi PSAT	ROO.24.09.13.06	Kepala Bidang Pangan	Pelaku usaha enggan untuk melaksanakan registrasi PSAT PDUK karena merasa tanpa registrasi usahanya sudah bisa berjalan	Eksternal	UC	Pelaku usaha tidak melakukan registrasi PSAT	Dinas dan Masyarakat	
7	Penyediaan Sarana Pengujian Keamanan dan Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan	Alat uji pengawasan pangan segar yang memenuhi ketentuan teknis susah ditemui di pasaran	ROO.24.09.13.07	Kepala Bidang Pangan	Terbatasnya ketersediaan Alat Uji Mutu Pangan di pasaran	Eksternal	C	Spesifikasi teknis alat uji mengarah ke salah satu penyedia	Dinas dan Masyarakat	
8	Penguatan Kelembagaan Pengawas Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Jumlah Dokumen Penguatan Kelembagaan Pengawas Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Pelaksanaan	Pelaku usaha tidak hadir pada saat pembinaan keamanan pangan	ROO.24.09.13.08	Kepala Bidang Pangan	Pelaku usaha lebih mementingkan bisnisnya daripada menghadiri pembinaan keamanan pangan	Eksternal	UC	Pelaku Usaha tidak terbina	Dinas dan Masyarakat	
9	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Pelaksanaan	Materi pembinaan keamanan pangan sudah tidak relevan	ROO.24.09.13.09	Kepala Bidang Pangan	Perubahan regulasi tentang keamanan pangan	Eksternal	UC	Implementasi di lapangan tidak sesuai dengan regulasi yang ada	Dinas dan Masyarakat	
				Penyediaan alat dan mesin pertanian belum optimal	ROO.24.27.26.01	Kepala Bidang Sarana dan Perlindungan Pertanian	Pemetaan rasio kebutuhan alat dan mesin pertanian belum maksimal	Internal	C	Alsintan yang diberikan kurang dapat menambah luas tanam pertanian	Dinas dan Masyarakat	
				Informasi penggunaan alsintan tidak tersampaikan secara optimal oleh petugas	ROO.24.27.26.02	Kepala Bidang Sarana dan Perlindungan Pertanian	Kurangnya kemampuan petugas dalam menyampaikan transfer informasi ke calon petani muda	Internal	C	Alsintan yang diberikan kurang dapat menambah luas tanam pertanian	Dinas dan Masyarakat	
				Kurangnya minat masyarakat menggeluti sektor pertanian	ROO.24.27.26.03	Kepala Bidang Sarana dan Perlindungan Pertanian	Kurangnya kemampuan petugas dalam menyampaikan transfer informasi ke calon petani muda	Internal	C	Menurunnya produksi	Dinas dan Masyarakat	
				Banyaknya alat dan mesin pertanian yang rusak	ROO.24.27.26.04	Kepala Bidang Sarana dan Perlindungan Pertanian	Kurangnya pembinaan terhadap Unit Pengelola Jasa Alsintan (UPJA)	Internal	C	Lamanya olah tanah, tanam dan panen sehingga tanam berikutnya mundur, sehingga luas tanam dan produksi tahunan menurun	Dinas dan Masyarakat	

No	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Sebab*)			C/UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Resiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
10	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Pelaksanaan	Tidak munculnya hak paten kopi Purworejo	ROO.24.27.26.05	Kepala Bidang Sarana dan Perlindungan Pertanian	Dinas tidak bisa melakukan pemberian hak paten kopi Purworejo sendiri harus bermitra dengan BRIN dan MPIG	Eksternal	C	Tidak tersedia deskripsi produk kopi Purworejo	Dinas
				Penyediaan benih dan pupuk belum optimal	ROO.24.27.26.06	Kepala Bidang Sarana dan Perlindungan Pertanian	Pengadaan benih dan pupuk tidak tepat waktu	Eksternal	UC	Target luas pertanaman dan produksi tidak tercapai sehingga kinerja Dinas menurun	Dinas dan Masyarakat
				Meningkatnya serangan hama dan penyakit tanaman	ROO.24.27.26.07	Kepala Bidang Sarana dan Perlindungan Pertanian	Ketersediaan bahan pengendali hama dan penyakit tanaman masih kurang	Eksternal	UC	Luas tanaman dan produksi menurun	Dinas dan Masyarakat
				Meningkatnya kerusakan tanaman karena banjir atau kekeringan	ROO.24.27.26.08	Kepala Bidang Sarana dan Perlindungan Pertanian	Kurangnya kemampuan petugas memprediksi cuaca	Internal	C	Menurunnya produksi pertanian	Dinas dan Masyarakat
				Informasi teknis pertanian tidak tersampaikan secara optimal oleh petugas	ROO.24.27.26.09	Kepala Bidang Sarana dan Perlindungan Pertanian	Kurangnya kemampuan petugas dalam menyampaikan transfer informasi ke petani	Internal	C	Produktivitas tanaman tidak optimal	Dinas dan Masyarakat
				Semakin berkurangnya lahan pertanian	ROO.24.27.26.10	Kepala Bidang Sarana dan Perlindungan Pertanian	Meningkatnya alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman	Eksternal	UC	Menurunnya luas tanaman	Dinas dan Masyarakat
			Perencanaan	Tujuan peningkatan kualitas SDG Kambing Kaligasing tidak bisa tercapai	ROO.24.27.26.11	Kepala Bidang Sarana dan Perlindungan Pertanian	Penggetahuan peternak dalam pemuliaan genetik ternak masih terbatas, masih sering terjadi <i>inbreeding</i>	Eksternal	C	Terjadi penurunan kualitas genetik kambing kaligasing	Dinas dan Masyarakat
			Pelaksanaan	Ketersediaan ternak kambing kaligasing yang sesuai spesifikasi dipasaran jumlahnya terbatas	ROO.24.27.26.12	Kepala Bidang Sarana dan Perlindungan Pertanian	Parameter spesifikasi kambing kaligasing yang sangat kompleks dan permintaan dari luar daerah yang cukup tinggi.	Eksternal	C	Proses Pengadaan ternak tidak selesai tepat waktu	Dinas dan Masyarakat
				Ternak kambing kaligasing tidak dipelihara dengan baik oleh kelompok penerima	ROO.24.27.26.13	Kepala Bidang Sarana dan Perlindungan Pertanian	Inisiatif pengajuan proposal tidak sepenuhnya dari anggota kelompok	Eksternal	C	Perkembangan ternak tidak optimal	Dinas dan Masyarakat

No	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Sebab*)			C/UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Resiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
12	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Jumlah SDG Hewan yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	Pelaporan	Kelompok Tani tidak melaporkan perkembangan ternak kambing kaligesing secara rutin	ROO.24.27.26.14	Kepala Bidang Sarana dan Perlindungan Pertanian	Asumsi kelompok tani bahwa ternak yang sudah diserahterimakan/ dihibahkan ke kelompok sudah bebas dalam mengelolanya dan tidak ada pertanggungjawaban.	Eksternal	C	Tujuan kegiatan untuk peningkatan populasi ternak kambing kaligesing tidak tercapai	Dinas dan Masyarakat
			Perencanaan	Produktivitas tembakau petani rendah	ROO.24.27.26.15	Kepala Bidang Sarana dan Perlindungan Pertanian	Kemurnian varietas dan ketahanan terhadap hama penyakit menurun	Eksternal	C	Budidaya tanaman tembakau tumpang sari dengan tanaman lainnya dan varietas benih yang tidak seragam	Dinas dan Masyarakat
			Pelaksanaan	Tidak munculnya varietas unggul lokal tembakau	ROO.24.27.26.16	Kepala Bidang Sarana dan Perlindungan Pertanian	Dinas tidak bisa melakukan pemurnian varietas sendiri harus bermitra dengan BRIN atau BPSB	Eksternal	C	Tidak tersedia varietas unggul lokal tembakau	Dinas
			Pelaporan	Kelompok tani tidak melaporkan jenis varietas, fisiologis dan jenis penyakit pada tanaman tembakaunya	ROO.24.27.26.17	Kepala Bidang Sarana dan Perlindungan Pertanian	Dinas tidak bisa melakukan pencatatan varietas dan fisiologis tanaman tembakau sendiri dan harus bekerjasama dengan BRIN	Eksternal	C	Tidak tersedia data pendukung pelepasan varietas unggul lokal tembakau	Dinas
13	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbarnya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain	Jumlah Bibit Ternak yang Sumbarnya dari Daerah Kabupaten/ Kota Lain	Perencanaan	Kelompok Tani calon penerima hibah ternak yang tidak tepat sasaran	ROO.24.27.26.18	Kepala Bidang Sarana dan Perlindungan Pertanian	Dokumen yang diajukan dalam proposal tidak sesuai realita di dikelompok tani	Eksternal	C	Bantuan ternak tidak tepat sasaran	Dinas dan Masyarakat
			Pelaksanaan	Calon penerima bantuan ternak tidak merata di semua kecamatan	ROO.24.27.26.19	Kepala Bidang Sarana dan Perlindungan Pertanian	Calon penerima hibah ditetapkan berdasarkan proposal yang masuk ke Dinas, Dinas sebatas menindaklanjuti usulan proposal yang masuk	Eksternal	C	Terjadinya kecemburuan di tingkat masyarakat	Dinas dan Masyarakat
			Pelaporan	Laporan pertanggungjawaban dari kelompok terkait pemanfaatan hibah ternak tidak tepat waktu	ROO.24.27.26.20	Kepala Bidang Sarana dan Perlindungan Pertanian	Kualitas SDM Kelompok Tani penerima kegiatan rendah	Eksternal	C	Laporan pelaksanaan hibah ternak ruminansia secara keseluruhan oleh Dinas menjadi terhambat	Dinas dan Masyarakat
14	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Perencanaan	Penetapan lokasi pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) yang tidak sesuai dengan syarat teknis dan syarat lokasi	ROO.24.27.26.21	Kepala Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian	Kekurang cermatan dalam melakukan CPCL/ verifikasi lapangan	Internal	C	JUT yang terbangun secara fungsi tidak bermanfaat	Dinas dan Masyarakat
			Pelaksanaan	Mark up harga material dalam penyusunan RAB pembangunan JUT	ROO.24.27.26.22	Kepala Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian	Pentuan harga material dalam RAB tidak didasarkan pada survey harga	Internal	C	Volume bangunan JUT yang terbangun menjadi lebih kecil dari yang seharusnya	Dinas dan Masyarakat
				Campuran bahan pembangunan JUT dengan kualitas rendah	ROO.24.27.26.23	Kepala Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian	Perbandingan campuran tidak sesuai dengan standar	Eksternal	UC	Bangunan JUT yang terbangun berkualitas rendah/ mudah rusak	Dinas dan Masyarakat

No	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Sebab*)			C/UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Resiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
15	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	d	e	f	g	h	i	j	k	l
				Volume hasil pekerjaan tidak terpenuhi sesuai RAB pembangunan JUT	ROO.24.27.26.24	Kepala Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian	Perhitungan di lapangan kurang teliti	Internal & Eksternal	U & UC	Dimensi bangunan JUT yang terbangun lebih kecil dari yang direncanakan	Dinas dan Masyarakat
				Pembangunan JUT terhambat/ terhenti	ROO.24.27.26.25	Kepala Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian	Terjadi bencana alam / <i>force majeure</i>	Eksternal	UC	JUT tidak terbangun	Dinas dan Masyarakat
				Hibah uang pembangunan JUT disalahgunakan tidak sesuai peruntukannya	ROO.24.27.26.26	Kepala Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian	Penyalahgunaan oleh oknum dari pihak penerima hibah	Eksternal	C	Pembangunan JUT tidak sesuai jadwal yang telah disepakati bersama- sama	Dinas dan Masyarakat
			Pelaporan	Laporan pertanggungjawaban terkait pelaksanaan pembangunan JUT tidak tepat waktu	ROO.24.27.26.27	Kepala Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian	Kualitas SDM kelompok tani penerima kegiatan rendah	Eksternal	UC	laporan pelaksanaan JUT secara keseluruhan oleh dinas menjadi terhambat	Dinas dan Masyarakat
			Perencanaan	Penetapan lokasi pembangunan sumur dangkal yang tidak sesuai dengan syarat teknis dan syarat lokasi	ROO.24.27.26.28	Kepala Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian	Kekurang cermatan dalam melakukan CPCL/ verifikasi lapangan	Internal	C	Pembangunan sumur dangkal yang terbangun secara fungsi tidak bermanfaat	Dinas dan Masyarakat
			Pelaksanaan	Mark up harga material dalam penyusunan RAB pembangunan ATD	ROO.24.27.26.29	Kepala Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian	Penentuan harga material dalam RAB tidak didasarkan pada survey harga	Internal	C	Volume bangunan sumur dangkal yang terbangun menjadi lebih kecil dari yang seharusnya	Dinas dan Masyarakat
				Volume hasil pekerjaan tidak terpenuhi sesuai RAB pembangunan ATD	ROO.24.27.26.30	Kepala Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian	Perhitungan di lapangan kurang teliti	Internal & Eksternal	U & UC	Dimensi bangunan sumur dangkal yang terbangun lebih kecil dari yang direncanakan	Dinas dan Masyarakat
				Peralatan pabrik tidak sesuai spesifikasi pembangunan ATD	ROO.24.27.26.31	Kepala Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian	Kekurangcermatan didalam pembelian peralatan	Eksternal	UC	Peralatan dengan kualitas rendah	Dinas dan Masyarakat
				Pembangunan sumur dangkal terhambat/ terhenti	ROO.24.27.26.32	Kepala Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian	Terjadi bencana alam / <i>force majeure</i>	Eksternal	UC	Pembangunan sumur dangkal tidak terbangun	Dinas dan Masyarakat

No	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Pemilik	Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko		Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
			Hibah uang pembangunan ATD disalahgunakan tidak sesuai peruntukannya	Laporan pertanggungjawaban terkait pelaksanaan pembangunan sumur dangkal tidak tepat waktu	ROO.24.27.26.33	Kepala Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian	Penyalahgunaan oleh oknum dari pihak penerima hibah	Eksternal	C	Pembangunan sumur dangkal tidak sesuai jadwal yang telah disepakati bersama-sama	Dinas dan Masyarakat
			Pelaporan	Laporan pertanggungjawaban terkait pelaksanaan pembangunan sumur dangkal tidak tepat waktu	ROO.24.27.26.34	Kepala Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian	Kualitas SDM kelompok tani penerima kegiatan rendah	Eksternal	UC	laporan pelaksanaan pembangunan sumur dangkal secara keseluruhan oleh dinas menjadi terhambat	Dinas dan Masyarakat
16	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Direhabilitasi	Perencanaan	Penetapan lokasi pembangunan saluran irigasi tidak sesuai dengan syarat teknis dan syarat lokasi	ROO.24.27.26.35	Kepala Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian	Kekurangcermatan dalam melakukan CPCL/ verifikasi lapangan	Internal	C	Saluran irigasi yang terbangun secara fungsi tidak bermanfaat	Dinas dan Masyarakat
			Pelaksanaan	Mark up harga material dalam penyusunan Rencana Anggaran Belanja (RAB) pembangunan saluran irigasi	ROO.24.27.26.36	Kepala Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian	Penentuan harga material dalam RAB tidak didasarkan pada survey harga	Internal	C	Volume bangunan saluran irigasi yang terbangun menjadi lebih kecil dari yang seharusnya	Dinas dan Masyarakat
				Campuran bahan pembangunan saluran irigasi dengan kualitas rendah	ROO.24.27.26.37	Kepala Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian	Perbandingan campuran tidak sesuai dengan standar	Eksternal	UC	Bangunan saluran irigasi kualitas rendah	Dinas dan Masyarakat
				Volume hasil pekerjaan tidak terpenuhi sesuai RAB pembangunan saluran irigasi	ROO.24.27.26.38	Kepala Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian	Perhitungan dari Tim Pelaksana kurang teliti	Eksternal	UC	Dimensi bangunan saluran irigasi yang terbangun lebih kecil dari yang direncanakan	Dinas dan Masyarakat
				Jenis bangunan saluran irigasi tidak tepat sesuai kondisi lokasi	ROO.24.27.26.39	Kepala Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian	Pemilihan jenis bangunan (cor beton/ pasangan batu/ siklop/ ferroement) yang tidak tepat berdasarkan kondisi lokasi di lapangan	Internal & Eksternal	U & UC	Bangunan mudah rusak	Dinas dan Masyarakat
				Pembangunan saluran irigasi terhambat/ terhenti	ROO.24.27.26.40	Kepala Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian	Terjadi bencana alam/ force majeure	Eksternal	UC	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT) tidak terbangun	Dinas dan Masyarakat
				Bangunan irigasi dengan sumber dana yang lain diklaim sebagai hasil pelaksanaan hibah uang pada tahun berjalan	ROO.24.27.26.41	Kepala Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian	Duplikasi alokasi anggaran	Eksternal	C	Anggaran tidak terserap atau terealisasi	Dinas dan Masyarakat

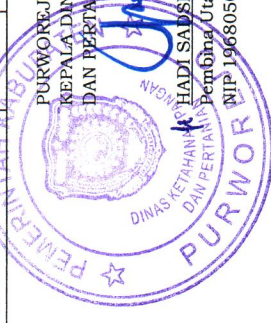
No	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Sebab*)			C/UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Resiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
17	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah Rumah Potong Hewan yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara serta Beroperasi	Pelaporan	Laporan pertanggungjawaban dari kelompok terkait pelaksanaan pembangunan saluran irigasi tidak tepat waktu	ROO.24.27.26.42	Kepala Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian	Kualitas SDM kelompok tani penerima kegiatan rendah	Eksternal	UC	Laporan pelaksanaan RJIT secara keseluruhan oleh dinas menjadi terhambat	Dinas dan Masyarakat
			Perencanaan	Penyusunan perencanaan rehabilitasi RPH tidak sesuai dengan petunjuk teknis	ROO.24.27.26.43	Kepala Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian	Kekurang cermatan dalam memahami petunjuk teknis	Internal	C	Bangunan yang terbangun tidak sesuai dengan petunjuk teknis	Dinas dan Masyarakat
				Perencanaan rehabilitasi RPH terhambat	ROO.24.27.26.44	Kepala Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian	Tidak mengetahui tata cara pembangunan/ renovasi bangunan cagar budaya	Internal	C	Proses perencanaan menjadi mundur	Dinas dan Masyarakat
			Pelaksanaan	Mutu bangunan rehabilitasi RPH dengan kualitas rendah	ROO.24.27.26.45	Kepala Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian	Pengawasan di lapangan tidak optimal	Internal & Eksternal	U & UC	Bangunan yang terbangun dengan kualitas rendah/ mutu jelek	Dinas dan Masyarakat
				Pembangunan RPH terhambat/ terhenti	ROO.24.27.26.46	Kepala Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian	Terjadi bencana alam/ <i>force majeure</i>	Eksternal	UC	RPH tidak terbangun	Dinas dan Masyarakat
				Pelaksanaan tidak menyelesaikan pembangunan/ rehabilitasi RPH	ROO.24.27.26.47	Kepala Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian	Pengendalian kegiatan lemah	Eksternal	C	Bangunan tidak terbangun seluruhnya	Dinas dan Masyarakat
			Pelaporan	Laporan pelaksanaan pembangunan RPH tidak tepat waktu	ROO.24.27.26.48	Kepala Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian	Petugas dinas tidak segera menyusun laporan pelaksanaan pembangunan RPH	Eksternal	UC	Pelaporan terhambat	Dinas dan Masyarakat
18	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak Dan Rumpun/ Galur Ternak	Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/ Galur Ternak	Perencanaan	Penetapan lokasi pembinaan dan pengawasan wilayah sumber bibit kambing kaligesing yang tidak tepat	ROO.24.27.26.49	Kepala Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian	Data populasi ternak kambing kaligesing tidak akurat	Internal	C	Kegiatan tidak tepat sasaran	Dinas dan Masyarakat
			Pelaksanaan	Peternak tidak datang pada saat pembinaan dan pengawasan wilayah sumber bibit kambing kaligesing	ROO.24.27.26.50	Kepala Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian	Kurang koordinasi dengan <i>stakeholder</i> terkait (Peternak, Pemerintah Desa)	Internal	C	Informasi tidak tersampaikan ke peternak	Dinas dan Masyarakat

No	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Sebab*)			C/UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode Resiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a											
19	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner		<p>Target pengambilan sampel wilayah sumber bibit tidak tercapai</p> <p>Pelaksanaan pengambilan sampel darah kambing kaligesing mundur dari jadwal</p> <p>Rekomendasi dinas atas hasil dari pengujian sampel wilayah sumber bibit tidak ditindak lanjuti oleh peternak</p>	<p>ROO.24.27.26.51</p> <p>ROO.24.27.26.52</p> <p>ROO.24.27.26.53</p>	<p>Kepala Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian</p> <p>Kepala Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian</p> <p>Kepala Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian</p>	<p>Penentuan lokasi desa pengambilan sampel yang tidak tepat</p> <p>Petugas terlambat datang dalam mengambil sampel</p> <p>kekhawatiran peternak terhadap hasil uji yang dinyatakan positif RBT</p>	<p>Internal</p> <p>Internal</p> <p>Internal</p>	<p>C</p> <p>C</p> <p>C</p>	<p>Analisa data tidak bisa maksimal</p> <p>Kegiatan tidak tepat waktu</p> <p>Peternak menjual/ membeli kambing yang dinyatakan positif padahal harusnya dilakukan perubahan pola budidaya mulai dari peningkatan kebersihan, pemberian pakan dsb sehingga hasil yang dinyatakan positif dikemudian hari dinyatakan negatif/ sehat.</p>	<p>Dinas dan Masyarakat</p> <p>Dinas dan Masyarakat</p> <p>Dinas dan Masyarakat</p>
			<p>Perencanaan</p> <p>Pelaksanaan</p>	<p>Ancaman penyakit hewan menular yang menjadi wabah, bersifat zoonosis dan berdampak ekonomi tidak bisa diprediksi</p> <p>Munculnya penyakit hewan baru dan penyakit hewan lama yang mewabah kembali</p>	<p>ROO.24.27.26.54</p> <p>ROO.24.27.26.55</p> <p>ROO.24.27.26.56</p>	<p>Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</p> <p>Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</p> <p>Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</p>	<p>Rencana pengadaan obat-obatan dan alat penunjang pengobatan kurang memadai jenis maupun jumlahnya</p> <p>Lalu lintas ternak antar daerah yang tidak dapat terpantau secara optimal dan keterlambatan penanganan kasus karena informasi yang minim dan tidak adanya petugas di setiap wilayah kecamatan</p> <p>Dana masuk dari pusat ke RKUD tidak pasti di awal tahun kegiatan, pengajuan SSH baru berdasar juknis DAK belum tentu dipahami oleh tim SSH BPKPAD</p>	<p>Internal</p> <p>Eksternal</p> <p>Eksternal</p>	<p>C</p> <p>UC</p> <p>UC</p>	<p>Wabah penyakit lambat tertangani karena obat-obatan dan alat pendukung pengobatan tidak sesuai/ tidak memadai</p> <p>Timbulnya keresahan di masyarakat dan kelesuan ekonomi ketika wabah penyakit menular dengan cepat dan bersifat zoonosis (menular ke manusia)</p> <p>Kegiatan tidak terlaksana dengan baik</p>	<p>Dinas dan Masyarakat</p> <p>Dinas dan Masyarakat</p> <p>Dinas dan Masyarakat</p>
			<p>Pelaporan</p>	<p>Laporan pelayanan jasa medik veteriner tidak tersusun tepat waktu</p>	<p>ROO.24.27.26.57</p>	<p>Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</p>	<p>Kebijakan terkait kegiatan untuk tahun selanjutnya akan terkendala dalam penyusunan</p>	<p>Internal</p>	<p>C</p>	<p>Perencanaan program tidak berjalan baik</p>	<p>Dinas dan Masyarakat</p>

No	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Sebab*)			C/UC	Dampak**)	Pihak yang Terkena
			Tahap	Uraian	Kode Resiko	Pemilik	Uraian	Sumber			
20	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	d	e	f	g	h	i	j	k	l
			Perencanaan	Adanya resiko bahan pangan asal hewan yang beredar di masyarakat tercemar bahan kimia, racun dan agen penyakit	ROO.24.27.26.58	Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rencana pengawasan tidak tepat	Eksternal	UC	Pelaksanaan tidak tepat sasaran	Dinas dan Masyarakat
			Pelaksanaan	Pangan asal hewan yang beredar tidak terjamin aman, sehat, utuh dan halal	ROO.24.27.26.59	Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Kesadaran pelaku usaha pangan asal hewan terhadap mutu dan hygiene produknya masih rendah	Eksternal	UC	Menurunnya kesehatan masyarakat konsumen akibat penyakit <i>food borne disease</i> dan residu kimia dari pangan asal hewan yang dikonsumsi	Dinas dan Masyarakat
			Pelaporan	Evaluasi peredaran hewan dan produk hewan tidak dapat dilaksanakan untuk perbaikan kedepan	ROO.24.27.26.60	Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Minimnya kegiatan pengawasan	Internal	C	Perencanaan program selanjutnya terhambat	Dinas dan Masyarakat
21	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Perencanaan	Ancaman hama dan penyakit tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan berdampak ekonomi tidak bisa diprediksi	ROO.24.27.26.61	Kepala Bidang Sarana dan Perlindungan Pertanian	Peramalan dan informasi trend terjadinya serangan OPT tidak valid	Eksternal	C	Penyediaan bahan dan alat untuk pengendalian OPT tidak sesuai	Dinas dan Masyarakat
			Pelaksanaan	Perubahan iklim yang ekstrim menimbulkan adanya OPT yang belum ada sebelumnya	ROO.24.27.26.62	Kepala Bidang Sarana dan Perlindungan Pertanian	Pelayaan Gerakan Pengendalian OPT tidak maksimal	Internal	C	Menurunnya tingkat serangan OPT tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Masyarakat
			Pelaporan	Laporan kejadian serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) lambat	ROO.24.27.26.63	Kepala Bidang Sarana dan Perlindungan Pertanian	Kurangnya koordinasi petani/kelompok tani dengan petugas POPT	internal	C	Pelaksanaan gerdal tidak tepat waktu	Masyarakat
22	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Perencanaan	Pelatihan tematik kegiatan DAK Non Fisik temanya belum bisa dibuat sesuai tema kebutuhan lokal per masing-masing BPP	ROO.24.27.26.64	Kepala Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian	Tema pelatihan tematik hanya ada 1 (satu) tema sedangkan kebutuhan petani dan penyuluh di setiap BPP berbeda	Eksternal	UC	Masih adanya tema pelatihan yang belum terakomodir	Penyuluh dan Petani
			Pelaksanaan	Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari DAK Non Fisik tidak bisa segera dilaksanakan	ROO.24.27.26.65	Kepala Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian	Permentan tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana DAK belum terbit.	Eksternal	UC	Pelaksanaan kegiatan yang didanai DAK Non Fisik pelaksanaannya mundur dari jadwal yang sudah direncanakan.	Petani, Penyuluh dan Masyarakat
			Pelaksanaan	Peserta pelatihan dan sarana bahan praktek pelatihan tematik masih terbatas	ROO.24.27.26.66	Kepala Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian	Pelatihan hanya bagi perwakilan ketua kelompok tani dan perwakilan penyuluh di masing-masing BPP	Internal	C	Cakupan perluasan materi pelatihan tematik terbatas	Petani dan Masyarakat

No	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko			Kode Resiko	Pemilik	Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Tabap	Uraian	Uraian			Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	
23	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelembagaan petani di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	Pelaporan	Pelaporan pelaksanaan pelatihan tematik bisa terlambat	ROO.24.27.26.67	Kepala Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian	Keterlambatan laporan pelaksanaan pelatihan tematik dari masing-masing BPP	Internal	C	Laporan pelaksanaan tidak bisa disajikan tepat waktu.	Dinas dan Masyarakat	
			Perencanaan	Penyuluh diberikan desa wilayah binaan yang jumlahnya melebihi kemampuan penyuluh	ROO.24.27.26.68	Kepala Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian	Keterbatasan jumlah penyuluh sehingga seorang penyuluh bisa mengampu sampai empat atau lima desa	Internal	C	Tidak semua pertemuan kelompok tani dapat dihadiri oleh penyuluh	Dinas dan Kelompok Tani	
			Pelaksanaan	Tidak semua perjalanan penyuluh ke petani maupun kelompok tani bisa terbiayai dengan perjalanan dinas.	ROO.24.27.26.69	Kepala Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian	Kemampuan dan keterbatasan dana untuk membiayai perjalanan dinas	Internal	C	Pelaksanaan penyuluhan menggunakan pembiayaan pribadi dari penyuluh pertanian	Penyuluh	
			Pelaporan	Laporan akhir kegiatan pengembangan kapasitas kelembagaan petani melebihi deadline akhir Desember	ROO.24.27.26.70	Kepala Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian	Kunjungan masih berjalan sampai akhir Desember	Internal	C	Laporan tidak bisa tersaji tepat waktu	Dinas dan Masyarakat	
24	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Perencanaan	Waktu pelaksanaan Sekolah Lapang (SL) mundur dari yang sudah dijadwalkan sebelumnya.	ROO.24.27.26.71	Kepala Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian	Adanya el nino sehingga masa tanam I (MT I) mundur.	Internal	C	Pelaksanaan sekolah lapang mundur atau bahkan dilakukan di musim tanam (MT II).	Dinas dan Masyarakat	
			Pelaksanaan	Petani pelaksana Sekolah Lapang (SL) pada saat pasca pelatihan tidak semua mau menerapkan teknologi yang diperoleh saat SL.	ROO.24.27.26.72	Kepala Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian	Kebiasaan petani dalam cara berusaha tani yang sudah menjadi kebiasaan sangat sulit untuk dirubah.	Eksternal	UC	Cara budidaya dan hasil yang diperoleh masih tetap seperti sebelum ada Sekolah Lapang (SL)	Dinas dan Petani	
			Pelaporan	Penyusunan laporan akhir kegiatan Sekolah Lapang (SL) melewati target waktu penyelesaian yang sudah ditetapkan.	ROO.24.27.26.73	Kepala Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian	Setiap BPP dalam urusan administrasi dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan SL masih kurang lengkap dan belum tersusun dengan tertib dan rapi.	Internal	C	Laporan tidak bisa menampilkan semua aspek secara utuh dan rinci dan tidak bisa selesai tepat waktu.	Dinas dan Petani	

PURWOREJO, 21 JULI 2024
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN KABUPATEN PURWOREJO



HADI SALSILA, SP., MM.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Purworejo
Nip. 196805051997031008

LAMPIRAN 5
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
 DAN PERTANIAN KABUPATEN PURWOREJO
 NOMOR : 500.6.1/4815/2024
 TANGGAL : 21 Juli 2024
 TENTANG MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN
 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
 KABUPATEN PURWOREJO

HASIL ANALISIS RISIKO

Nama Pemda : Kabupaten Purworejo
 Tahun Penilaian : 2024
 Tujuan Strategis OPD : 1. Pemantapan Ketahanan Pangan
 2. Peningkatan Kesejahteraan Petani
 3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
 Urusan Pemerintahan : Bidang Pangan; Bidang Pertanian

No.	Risiko yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan*)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
I Risiko Strategis :					
R1	Menurunnya produksi pangan	RSO.24.09.13.01	4	2	8
R2	Menurunnya luas panen komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	RSO.24.27.26.01	4	1	4
R3	Menurunnya populasi hewan	RSO.24.27.26.02	3	1	3
II Risiko Operasional :					
R4	Pelaksanaan distribusi pangan tidak optimal	ROO.24.09.13.01	2	1	2
R5	Responden pemberi informasi harga dan stok pangan tidak	ROO.24.09.13.02	2	1	2
R6	Data pendukung penyusunan dokumen NBM tidak lengkap	ROO.24.09.13.03	2	1	2
R7	Sosialisasi B2SA tidak berjalan lancar	ROO.24.09.13.04	2	1	2
R8	Belum semua desa rentan rawan pangan mendapat intervensi	ROO.24.09.13.05	2	2	4
R9	Pelaku usaha belum mempunyai kesadaran untuk melakukan	ROO.24.09.13.06	2	1	2
R10	Alat uji pengawasan pangan segar yang memenuhi ketentuan teknis	ROO.24.09.13.07	2	1	2
R11	Pelaku usaha tidak hadir pada saat pembinaan keamanan pangan	ROO.24.09.13.08	2	1	2
R12	Materi pembinaan keamanan pangan sudah tidak relevan	ROO.24.09.13.09	2	1	2
R13	Penyediaan alat dan mesin pertanian belum optimal	ROO.24.27.26.01	2	2	4
R14	Informasi penggunaan alsintan tidak tersampaikan secara optimal oleh	ROO.24.27.26.02	2	2	4
R15	Kurangnya minat masyarakat menggeluti sektor pertanian	ROO.24.27.26.03	2	2	4
R16	Banyaknya alat dan mesin pertanian yang rusak	ROO.24.27.26.04	3	2	6
R17	Penyediaan benih dan pupuk belum optimal	ROO.24.27.26.06	2	2	4
R18	Meningkatnya serangan hama dan penyakit tanaman	ROO.24.27.26.07	2	2	4
R19	Meningkatnya kerusakan tanaman karena banjir atau kekeringan	ROO.24.27.26.08	2	2	4

No.	Risiko yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan*)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
R20	Informasi teknis pertanian tidak tersampaikan secara optimal oleh	ROO.24.27.26.09	2	2	4
R21	Semakin berkurangnya lahan pertanian	ROO.24.27.26.10	2	2	4
R22	Tujuan peningkatan kualitas SDG Kambing Kaligesing tidak bisa	ROO.24.27.26.11	2	2	4
R23	Ketersediaan ternak kambing kaligesing yang sesuai spesifikasi	ROO.24.27.26.12	2	2	4
R24	Ternak kambing kaligesing tidak dipelihara dengan baik oleh	ROO.24.27.26.13	2	2	4
R25	Kelompok Tani tidak melaporkan perkembangan ternak kambing	ROO.24.27.26.14	2	2	4
R26	Produktivitas tembakau petani rendah	ROO.24.27.26.15	3	2	6
R27	Kelompok tani tidak melaporkan jenis varietas, fisiologis dan jenis	ROO.24.27.26.17	2	2	4
R28	Kelompok Tani calon penerima hibah ternak yang tidak tepat	ROO.24.27.26.18	2	2	4
R29	Calon penerima bantuan ternak tidak merata di semua kecamatan	ROO.24.27.26.19	2	2	4
R30	Laporan pertanggungjawaban dari kelompok terkait pemanfaatan hibah	ROO.24.27.26.20	2	2	4
R31	Penetapan lokasi pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) yang tidak	ROO.24.27.26.21	4	1	4
R32	Pembangunan JUT terhambat/ terhenti	ROO.24.27.26.25	3	1	3
R33	Laporan pertanggungjawaban terkait pelaksanaan pembangunan JUT	ROO.24.27.26.27	3	1	3
R34	Penetapan lokasi pembangunan sumur dangkal yang tidak sesuai	ROO.24.27.26.28	4	1	4
R35	Peralatan pabrikan tidak sesuai spesifikasi pembangunan ATD	ROO.24.27.26.31	3	1	3
R36	Pembangunan sumur dangkal terhambat/ terhenti	ROO.24.27.26.32	3	1	3
R37	Laporan pertanggungjawaban terkait pelaksanaan pembangunan sumur	ROO.24.27.26.34	3	1	3
R38	Penetapan lokasi pembangunan saluran irigasi tidak sesuai dengan	ROO.24.27.26.35	4	1	4
R39	Jenis bangunan saluran irigasi tidak tepat sesuai kondisi lokasi	ROO.24.27.26.39	3	1	3
R40	Pembangunan saluran irigasi terhambat/ terhenti	ROO.24.27.26.40	4	1	4
R41	Bangunan irigasi dengan sumber dana yang lain diklaim sebagai hasil	ROO.24.27.26.41	3	1	3
R42	Laporan pertanggungjawaban dari kelompok terkait pelaksanaan	ROO.24.27.26.42	3	1	3
R43	Penyusunan perencanaan rehabilitasi RPH tidak sesuai dengan	ROO.24.27.26.43	4	1	4
R44	Perencanaan rehabilitasi RPH terhambat	ROO.24.27.26.44	4	1	4
R45	Pembangunan RPH terhambat/ terhenti	ROO.24.27.26.46	4	1	4
R46	Pelaksana tidak menyelesaikan pembangunan/ rehabilitasi RPH	ROO.24.27.26.47	4	1	4
R47	Laporan pelaksanaan pembangunan RPH tidak tepat waktu	ROO.24.27.26.48	3	1	3
R48	Penetapan lokasi pembinaan dan pengawasan wilayah sumber bibit	ROO.24.27.26.49	3	1	3
R49	Peternak tidak datang pada saat pembinaan dan pengawasan wilayah	ROO.24.27.26.50	4	1	4

No.	Risiko yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan*)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
R50	Target pengambilan sampel wilayah sumber bibit tidak tercapai	ROO.24.27.26.51	3	1	3
R51	Pelaksanaan pengambilan sampel darah kambing kaligesing mundur	ROO.24.27.26.52	3	1	3
R52	Rekomendasi dinas atas hasil dari pengujian sampel wilayah sumber	ROO.24.27.26.53	3	1	3
R53	Ancaman penyakit hewan menular yang menjadi wabah, bersifat	ROO.24.27.26.54	3	2	6
R54	Munculnya penyakit hewan baru dan penyakit hewan lama yang	ROO.24.27.26.55	3	3	9
R55	Pelaksanaan DAK Non Fisik operasional puskesmas terkait peng	ROO.24.27.26.56	2	2	4
R56	Laporan pelayanan jasa medik veteriner tidak tersusun tepat waktu	ROO.24.27.26.57	2	2	4
R57	Adanya resiko bahan pangan asal hewan yang beredar di masyarakat	ROO.24.27.26.58	3	2	6
R58	Pangan asal hewan yang beredar tidak terjamin aman, sehat, utuh	ROO.24.27.26.59	3	2	6
R59	Evaluasi peredaran hewan dan produk hewan tidak dapat	ROO.24.27.26.60	2	2	4
R60	Ancaman hama dan penyakit tanaman pangan, hortikultura dan	ROO.24.27.26.61	2	2	4
R61	Perubahan iklim yang ekstrim menimbulkan adanya OPT yang	ROO.24.27.26.62	2	2	4
R62	Laporan kejadian serangan Organisme Pengganggu Tanaman	ROO.24.27.26.63	3	3	9
R63	Pelatihan tematik kegiatan DAK Non Fisik temanya belum bisa dibuat	ROO.24.27.26.64	3	2	6
R64	Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari DAK Non Fisik tidak bisa segera	ROO.24.27.26.65	3	1	3
R65	Peserta pelatihan dan sarana bahan praktek pelatihan tematik masih	ROO.24.27.26.66	4	1	4
R66	Pelaporan pelaksanaan pelatihan tematik bisa terlambat	ROO.24.27.26.67	3	1	3
R67	Penyuluh diberikan desa wilayah binaan yang jumlahnya melebihi	ROO.24.27.26.68	3	1	3
R68	Tidak semua perjalanan penyuluh ke petani maupun kelompok tani	ROO.24.27.26.69	1	3	3
R69	Laporan akhir kegiatan pengembangan kapasitas	ROO.24.27.26.70	3	1	3
R70	Waktu pelaksanaan Sekolah Lapang (SL) mundur dari yang sudah	ROO.24.27.26.71	3	2	6
R71	Petani pelaksana Sekolah Lapang (SL) pada saat pasca pelatihan tidak	ROO.24.27.26.72	3	3	9
R72	Penyusunan laporan akhir kegiatan Sekolah Lapang (SL) melewati target	ROO.24.27.26.73	2	1	2
III	Risiko Kemitraan :				
R73	Tidak munculnya hak paten kopi Purworejo	ROO.24.27.26.05	3	3	9
R74	Tidak munculnya varietas unggul lokal tembakau	ROO.24.27.26.16	2	3	6
IV	Risiko Fraud/ Kecurangan :				
R75	Mark up harga material dalam penyusunan RAB pembangunan	ROO.24.27.26.22	3	2	6
R76	Campuran bahan pembangunan JUT dengan kualitas rendah	ROO.24.27.26.23	3	2	6
R77	Volume hasil pekerjaan tidak terpenuhi sesuai RAB pembangunan	ROO.24.27.26.24	3	2	6

No.	Risiko yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan*)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
R78	Hibah uang pembangunan JUT disalahgunakan tidak sesuai	ROO.24.27.26.26	4	1	4
R79	Mark up harga material dalam penyusunan RAB pembangunan	ROO.24.27.26.29	3	2	6
R80	Volume hasil pekerjaan tidak terpenuhi sesuai RAB pembangunan	ROO.24.27.26.30	3	2	6
R81	Hibah uang pembangunan ATD disalahgunakan tidak sesuai	ROO.24.27.26.33	3	1	3
R82	Mark up harga material dalam penyusunan Rencana Anggaran	ROO.24.27.26.36	3	2	6
R83	Campuran bahan pembangunan saluran irigasi dengan kualitas	ROO.24.27.26.37	3	2	6
R84	Volume hasil pekerjaan tidak terpenuhi sesuai RAB pembangunan	ROO.24.27.26.38	3	1	3
R85	Mutu bangunan rehabilitasi RPH dengan kualitas rendah	ROO.24.27.26.45	4	2	8



PURWOREJO, 21 JULI 2024
 KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
 DAN PERTANIAN KABUPATEN PURWOREJO

HADI SADSILA, SP., MM.
 Pembina Utama Muda / IV c
 NIP 196805051997031008


LAMPIRAN 6
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
 DAN PERTANIAN KABUPATEN PURWOREJO
 NOMOR : 500.6.1 / 4815 / 2024
 TANGGAL : 21 Juli 2024
 TENTANG MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN
 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
 KABUPATEN PURWOREJO

MATRIKS ANALISIS RISIKO

Kemungkinan Terjadinya Risiko	Dampak / Konsekuensi			
	Tidak signifikan	Kecil	Besar	Sangat Signifikan
	1	2	3	4
Hampir Pasti				
Kemungkinan Besar	R68	R74	R54, R62, R71, R73	
Kemungkinan Kecil		R8, R13, R14, R15, R17, R18, R19, R20, R21, R22, R23, R24, R25, R27, R28, R29, R30, R55, R56, R59, R60, R61	R16, R26, R53, R57, R58, R63, R70, R75, R76, R77, R79, R80, R82, R83	R1, R85
Sangat jarang		R4, R5, R6, R7, R9, R10, R11, R12, R72	R3, R32, R33, R35, R3, R37, R39, R41, R42, R47, R48, R50, R51, R52, R64, R66, R67, R69, R81, R84	R2, R31, R34, R38, R40, R43, R44, R45, R46, R49, R65, R78

Keterangan :	Sangat Rendah	Rendah	Tinggi	Sangat Tinggi
--------------	---------------	--------	--------	---------------

PURWOREJO, 21 JULI 2024
 KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
 DAN PERTANIAN KABUPATEN PURWOREJO



HADI SADSILA, SP., MM.
 Pembina Utama Muda / IV c
 NIP. 196805051997031008

LAMPIRAN 7
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
 DAN PERTANIAN KABUPATEN PURWOREJO
 NOMOR : 500.6.1 / 4815 / 2024
 TANGGAL : 21 Juli 2024
 TENTANG MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN
 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
 KABUPATEN PURWOREJO

DAFTAR RISIKO PRIORITAS

Nama Pemda : Kabupaten Purworejo
 Tahun Penilaian : 2024
 Tujuan Strategis : 1. Pemantapan Ketahanan Pangan
 2. Peningkatan Kesejahteraan Petani
 3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
 Urusan Pemerintahan : Bidang Pangan; Bidang Pertanian

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
I	Risiko Strategis					
R1	Menurunnya produksi pangan	RSO.24.09.13.01	8	Kepala DKPP	1. Pendampingan Petugas (PPL dan POPT) belum optimal 2. Keterbatasan dukungan anggaran 3. Pengendalian hama dan penyakit belum optimal 4. Penyediaan sarana dan prasarana masih belum maksimal 5. Adanya alih fungsi lahan pertanian 6. Ketersediaan pupuk bersubsidi tidak sesuai kebutuhan	1. Inflasi tinggi 2. Ketidakcukupan ketersediaan pangan di masyarakat 3. Reputasi dinas menurun karena adanya keluhan di masyarakat 4. Timbul gejala sosial di masyarakat

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
II	Risiko Operasional					
R54	Munculnya penyakit hewan baru dan penyakit hewan lama yang mewabah kembali	ROO.24.27.26.55	9	Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Lalu lintas ternak antar daerah yang tidak dapat terpantau secara optimal dan keterlambatan penanganan kasus karena informasi yang minim dan tidak adanya petugas di setiap wilayah kecamatan	Timbulnya keresahan di masyarakat dan kelesuan ekonomi ketika wabah penyakit menular dengan cepat dan bersifat zoonosis (menular ke manusia)
R62	Laporan kejadian serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) lambat	ROO.24.27.26.63	9	Kepala Bidang Sarana dan Perlindungan Pertanian	Kurangnya koordinasi petani/ kelompok tani dengan petugas POPT	Pelaksanaan gerdal tidak tepat waktu
R71	Petani pelaksana Sekolah Lapang (SL) pada saat pasca pelatihan tidak semua mau menerapkan teknologi yang diperoleh saat SL.	ROO.24.27.26.72	9	Kepala Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian	Kebiasaan petani dalam cara berusaha tani yang sudah menjadi kebiasaan sangat sulit untuk dirubah.	Cara budidaya dan hasil yang diperoleh masih tetap seperti sebelum ada Sekolah Lapang (SL)
R16	Banyaknya alat dan mesin pertanian yang rusak	ROO.24.27.26.04	6	Kepala Bidang Sarana dan Perlindungan Pertanian	Kurangnya pembinaan terhadap Unit Pengelola Jasa Alsintan (UPJA)	Lamanya olah tanah, tanam dan panen sehingga tanam berikutnya mundur, sehingga luas tanam dan produksi tahunan menurun
R26	Produktivitas tembakau petani rendah	ROO.24.27.26.15	6	Kepala Bidang Sarana dan Perlindungan Pertanian	Kemurnian varietas dan ketahanan terhadap hama penyakit menurun	Budidaya tanaman tembakau tumpang sari dengan tanaman lainnya dan varietas benih yang tidak seragam
R53	Ancaman penyakit hewan menular yang menjadi wabah, bersifat zoonosis dan berdampak ekonomi tidak bisa diprediksi	ROO.24.27.26.54	6	Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rencana pengadaan obat-obatan dan alat penunjang pengobatan kurang memadai jenis maupun jumlahnya	Wabah penyakit lambat tertangani karena obat-obatan dan alat pendukung pengobatan tidak sesuai/ tidak memadai
R57	Adanya resiko bahan pangan asal hewan yang beredar di masyarakat tercemar bahan kimia, racun dan agen penyakit	ROO.24.27.26.58	6	Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rencana pengawasan tidak tepat	Pelaksanaan tidak tepat sasaran

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
R58	Pangan asal hewan yang beredar tidak terjamin aman, sehat, utuh dan halal	ROO.24.27.26.59	6	Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Kesadaran pelaku usaha pangan asal hewan terhadap mutu dan hygiene produksinya masih rendah	Menurunnya kesehatan masyarakat konsumen akibat penyakit food borne disease dan residu kimia dari pangan asal hewan yang dikonsumsi
R63	Pelatihan tematik kegiatan DAK Non Fisik temanya belum bisa dibuat sesuai tema kebutuhan lokal per masing-masing BPP	ROO.24.27.26.64	6	Kepala Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian	Tema pelatihan tematik hanya ada 1 (satu) tema sedangkan kebutuhan petani dan penyuluh di setiap BPP berbeda	Masih adanya tema pelatihan yang belum terakomodir
R70	Waktu pelaksanaan Sekolah Lapang (SL) mundur dari yang sudah dijadwalkan sebelumnya.	ROO.24.27.26.71	6	Kepala Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian	Adanya el nino sehingga masa tanam I (MT I) mundur.	Pelaksanaan sekolah lapang mundur atau bahkan dilakukan di musim tanam (MT) II.
III	Risiko Kemitraan					
R73	Tidak munculnya hak paten kopi Purworejo	ROO.24.27.26.05	9	Kepala Bidang Sarana dan Perlindungan Pertanian	Dinas tidak bisa melakukan pemberian hak paten kopi Purworejo sendiri harus bermitra dengan BRIN dan MPIG	Tidak tersedia deskripsi produk kopi Purworejo
R74	Tidak munculnya varietas unggul lokal tembakau	ROO.24.27.26.16	6	Kepala Bidang Sarana dan Perlindungan Pertanian	Dinas tidak bisa melakukan pemurnian varietas sendiri harus bermitra dengan BRIN atau BPSB	Tidak tersedia varietas unggul lokal tembakau
IV	Risiko Fraud/ Kecurangan					
R85	Mutu bangunan rehabilitasi RPH dengan kualitas rendah	ROO.24.27.26.45	8	Kepala Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian	Pengawasan di lapangan tidak optimal	Bangunan yang terbangun dengan kualitas rendah/ mutu jelek
R75	Mark up harga material dalam penyusunan RAB pembangunan JUT	ROO.24.27.26.22	6	Kepala Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian	Penentuan harga material dalam RAB tidak didasarkan pada survey harga	Volume bangunan JUT yang terbangun menjadi lebih kecil dari yang seharusnya

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
R76	Campuran bahan pembangunan JUT dengan kualitas rendah	ROO.24.27.26.23	6	Kepala Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian	Perbandingan campuran tidak sesuai dengan standar	Bangunan JUT yang terbangun berkualitas rendah/ mudah rusak
R77	Volume hasil pekerjaan tidak terpenuhi sesuai RAB pembangunan JUT	ROO.24.27.26.24	6	Kepala Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian	Perhitungan di lapangan kurang teliti	Dimensi bangunan JUT yang terbangun lebih kecil dari yang direncanakan
R79	Mark up harga material dalam penyusunan RAB pembangunan ATD	ROO.24.27.26.29	6	Kepala Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian	Penentuan harga material dalam RAB tidak didasarkan pada survey harga	Volume bangunan sumur dangkal yang terbangun menjadi lebih kecil dari yang seharusnya
R80	Volume hasil pekerjaan tidak terpenuhi sesuai RAB pembangunan ATD	ROO.24.27.26.30	6	Kepala Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian	Perhitungan di lapangan kurang teliti	Dimensi bangunan sumur dangkal yang terbangun lebih kecil dari yang direncanakan
R82	Mark up harga material dalam penyusunan Rencana Anggaran Belanja (RAB) pembangunan saluran irigasi	ROO.24.27.26.36	6	Kepala Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian	Penentuan harga material dalam RAB tidak didasarkan pada survey harga	Volume bangunan saluran irigasi yang terbangun menjadi lebih kecil dari yang seharusnya
R83	Campuran bahan pembangunan saluran irigasi dengan kualitas rendah	ROO.24.27.26.37	6	Kepala Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian	Perbandingan campuran tidak sesuai dengan standar	Bangunan saluran irigasi kualitas rendah

PURWOREJO, 21 JULI 2024
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN KABUPATEN PURWOREJO



LAMPIRAN 8
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
 DAN PERTANIAN KABUPATEN PURWOREJO
 NOMOR : 500.6.1 / 4815 / 2024
 TANGGAL : 21 Juli 2024
 TENTANG MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN
 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
 KABUPATEN PURWOREJO

PENILAIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN YANG ADA DAN MASIH DIBUTUHKAN

Nama Pemda : Kabupaten Purworejo
 Tahun Penilaian : 2024
 Tujuan Strategis : 1. Pemantapan Ketahanan Pangan
 2. Peningkatan Kesejahteraan Petani
 3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
 Urusan Pemerintahan : Bidang Pangan; Bidang Pertanian

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik / Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
I	Risiko Strategis						
R1	Menurunnya produksi pangan	RSO.24.09.13.01	Pembagian wilayah binaan PPL dan POPT menyesuaikan luas wilayah dan jumlah petani Sudah ada penjadwalan pengamatan OPT, sudah ada SOP OPT Hibah sarana dan prasarana pertanian diberikan setiap tahun	Jumlah PPL dan POPT belum memenuhi kebutuhan SOP belum diimplementasikan secara optimal Penyediaan sarana dan prasarana pertanian tidak merata	Mengusulkan rekrutmen PPL dan POPT Melaksanakan pengamatan OPT secara berkala Melaksanakan verifikasi dan validasi usulan hibah sarana dan prasarana pertanian	Kepala DKPP Kepala DKPP Kepala DKPP	Desember 2024 Desember 2024 Juni 2024

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
			Sudah ada SK penetapan LP2B	Belum ada reward and punishment terkait penggunaan LP2B	Melaksanakan sosialisasi SK penetapan LP2B	Kepala DKPP	Desember 2024
			Penyusunan RDKK pupuk bersubsidi difasilitasi oleh PPL	Validasi data kurang sempurna	Melaksanakan koordinasi dengan <i>stakeholder</i> terkait (Kelompok Tani, BRI, Kementerian Pertanian, Distributor pupuk bersubsidi)	Kepala DKPP	Desember 2024
II	Risiko Operasional						
R54	Munculnya penyakit hewan baru dan penyakit hewan lama yang mewabah kembali	ROO.24.27.26.55	Melakukan KIE kepada para pelaku usaha peternakan, baik peternak maupun pedagang agar waspada dan hati-hati mendatangkan ternak dari luar daerah	Pelaku usaha dan pedagang dalam melululintaskan tidak memakai SOP yang berlaku sesuai peraturan perundangan sehingga tidak dapat dilacak secara sistem melalui ISIKHNAS	Mensosialisasikan pentingnya lalulintas hewan melalui sistem ISIKHNAS sehingga akan memudahkan penelusuran jika muncul penyakit dari hewan yang baru didatangkan	Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	September 2024
R62	Laporan kejadian serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) lambat	ROO.24.27.26.63	Keputusan Dirjen Tanaman Pangan Nomor 127/HK.310/C/5/2021 tentang Petunjuk Teknis Pengamatan dan Pelaporan Organisme Pengganggu Tumbuhan serta Dampak Perubahan Iklim	Koordinasi dengan petugas POPT di wilayah kerja masing masing setiap bulan	Melakukan pertemuan petugas OPT sebulan 2 kali	Kepala Bidang Sarana dan Perlindungan Pertanian	Desember 2024

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
R71	Petani pelaksana Sekolah Lapang (SL) pada saat pasca pelatihan tidak semua mau menerapkan teknologi yang diperoleh saat SL.	ROO.24.27.26.72	Juknis Sekolah Lapang	Petani sudah terbiasa dengan cara budidaya yang sudah dilakukan selama ini	Sosialisasi pentingnya pelaksanaan dan keberlanjutan kegiatan Sekolah Lapang	Kepala Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian	September 2024
R16	Banyaknya alat dan mesin pertanian yang rusak	ROO.24.27.26.04	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian	Kemampuan petani dan petugas dalam pengelolaan alat dan mesin pertanian belum optimal	Sosialisasi dan pembinaan pembentukan Usaha Pengelolaan Jasa Alat dan Mesin Pertanian	Kepala Bidang Sarana dan Perlindungan Pertanian	Desember 2024
R26	Produktivitas tembakau petani rendah	ROO.24.27.26.15	Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan	Kesehatan benih, jenis penyebab penyakit dan dosis pupuk belum optimal	Penyusunan SOP Budidaya tembakau	Kepala Bidang Sarana dan Perlindungan Pertanian	Juni 2024
R53	Ancaman penyakit hewan menular yang menjadi wabah, bersifat zoonosis dan berdampak ekonomi tidak bisa diprediksi	ROO.24.27.26.54	Melakukan pelayanan kesehatan hewan mulai dari surveilans, pemeriksaan dan pengobatan setiap bulan	Jumlah dan luasan desa sasaran belum dapat terjangkau secara menyeluruh	Menambah jangkauan pelayanan di wilayah yang bebatasan langsung dengan daerah lain	Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	September 2024
R57	Adanya resiko bahan pangan asal hewan yang beredar di masyarakat tercemar bahan kimia, racun dan agen penyakit	ROO.24.27.26.58	Pengambilan sampel bahan panganan asal hewan untuk diuji secara laboratorium untuk mengetahui cemaran kimia maupun biologis	Persentase sampel yang diambil sangat kecil dari jumlah bahan pangan asal hewan yang beredar sehingga belum dapat menggambarkan keadaan yang sebenarnya	Pengambilan sampel di pasar yang besar dan yang menjual bahan pangan asal hewan yang berasal dari luar daerah	Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	September 2024

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
R58	Pangan asal hewan yang beredar tidak terjamin aman, sehat, utuh dan halal	ROO.24.27.26.59	Melakukan pengawasan dan pemeriksaan bahan pangan asal hewan di RPH, RPU dan pasar pasar setiap bulan secara terjadwal	Pengawasan belum dapat menjangkau secara menyeluruh dimana bahan pangan asal hewan diproduksi, diedarkan dan dilalulintaskan	Menjadwalkan pengawasan ke pasar desa yang belum terjangkau seperti di wilayah perbatasan kabupaten	Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	September 2024
R63	Pelatihan tematik kegiatan DAK Non Fisik temanya belum bisa dibuat sesuai tema kebutuhan lokal per masing-masing BPP	ROO.24.27.26.64	Peraturan Menteri Pertanian tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik dan Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2024	Pengadaan bahan praktek jenisnya tidak bisa berbeda-beda untuk masing-masing BPP	Sosialisasi pelaksanaan kegiatan pelatihan tematik DAK Non Fisik 2024	Kepala Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian	September 2024
R70	Waktu pelaksanaan Sekolah Lapang (SL) mundur dari yang sudah dijadwalkan sebelumnya.	ROO.24.27.26.71	Peraturan Bupati Purworejo No. 11 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengaturan Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam Musim Tanam Tahun 2020/2021 sampai dengan Musim Tanam Tahun 2024/2025 di Kabupaten Purworejo	Pelaksanaan Sekolah Lapang mundur di musim tanam berikutnya	Sosialisasi jadwal pelaksanaan kegiatan sekolah lapang	Kepala Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian	September 2024

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
III	Risiko Kemitraan						
R73	Tidak munculnya hak paten kopi Purworejo	ROO.24.27.26.05	Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Nomor PHN-28 L.T.02.01 Tahun 2011 tentang Pengkajian Hukum Perlindungan Varietas Tanaman Lokal dalam Hukum Nasional dan Internasional	Belum terinventarisasinya data produksi kopi mentah, produk olahan kopi dan pengolah kopi	Penyusunan Indikasi Geografis Kopi Robusta Kabupaten Purworejo	Kepala Bidang Sarana dan Perlindungan Pertanian	Desember 2024
R74	Tidak munculnya varietas unggul lokal tembakau	ROO.24.27.26.16	Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Genetik dan Pelepasan Varietas Tanaman Perkebunan	Varietas yang ada terkontaminasi dengan varietas lain menurunkan daya tahan terhadap hama penyakit, perubahan iklim dan produktivitas menurun	Pelepasan varietas tembakau unggul lokal	Kepala Bidang Sarana dan Perlindungan Pertanian	Desember 2024
IV	Risiko Fraud/ Kecurangan						
R85	Mutu bangunan rehabilitasi RPH dengan kualitas rendah	ROO.24.27.26.45	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pelaksanaan konstruksi oleh penyedia tidak sesuai dengan spesifikasi teknis	Monitoring dan pengawasan secara berkala selama pelaksanaan pekerjaan konstruksi RPH	Kepala Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian	Desember 2024

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
R75	Mark up harga material dalam penyusunan RAB pembangunan JUT	ROO.24.27.26.22	Peraturan Bupati Purworejo Nomor 142 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Barang /Jasa Tahun 2024;	Penentuan harga satuan material diatas standar dalam peraturan	Sosialisasi pelaksanaan pembangunan jalan usaha tani	Kepala Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian	Juni 2024
R76	Campuran bahan pembangunan JUT dengan kualitas rendah	ROO.24.27.26.23	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	penyusunan bahan tidak sesuai dengan koefisien dalam peraturan	Penyusunan RAB pembangunan JUT sesuai analisa teknis	Kepala Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian	September 2024
R77	Volume hasil pekerjaan tidak terpenuhi sesuai RAB pembangunan JUT	ROO.24.27.26.24	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	volume hasil pekerjaan dibawah perhitungan dalam analisa satuan pekerjaan	Monitoring dan pendampingan pekerjaan fisik JUT secara intensif	Kepala Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian	September 2024

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
R79	Mark up harga material dalam penyusunan RAB pembangunan ATD	ROO.24.27.26.29	Peraturan Bupati Purworejo Nomor 142 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Barang /Jasa Tahun 2024;	Penentuan harga satuan material diatas standar dalam peraturan	Sosialisasi pelaksanaan pembangunan irigasi ATD	Kepala Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian	September 2024
R80	Volume hasil pekerjaan tidak terpenuhi sesuai RAB pembangunan ATD	ROO.24.27.26.30	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	volume hasil pekerjaan dibawah perhitungan dalam analisa satuan pekerjaan	Penyusunan RAB pembangunan irigasi ATD sesuai analisa teknis	Kepala Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian	September 2024
R82	Mark up harga material dalam penyusunan Rencana Anggaran Belanja (RAB) pembangunan saluran irigasi	ROO.24.27.26.36	Peraturan Bupati Purworejo Nomor 142 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Barang /Jasa Tahun 2024;	Penentuan harga satuan material diatas standar dalam peraturan	Sosialisasi pelaksanaan pembangunan jaringan irigasi	Kepala Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian	September 2024

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
R83	Campuran bahan pembangunan saluran irigasi dengan kualitas rendah	ROO.24.27.26.37	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	penyusunan bahan tidak sesuai dengan koefisien dalam peraturan	Monitoring dan pendampingan pekerjaan fisik saluran irigasi secara intensif	Kepala Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian	September 2024

PURWOREJO, 21 JULI 2024
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN KABUPATEN PURWOREJO



HADI SAHSILA, SP., MM.
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 196805051997031008

LAMPIRAN 9
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
 DAN PERTANIAN KABUPATEN PURWOREJO
 NOMOR : 500.6.1 / 4815 / 2024
 TANGGAL : 21 Juli 2024
 TENTANG MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN
 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
 KABUPATEN PURWOREJO

PENINGKATAN PENYEDIAAN DAN DISTRIBUSI

Nama Pemda : Kabupaten Purworejo
 Tahun Penilaian : 2024
 Tujuan Strategis : 1. Pemantapan Ketahanan Pangan
 2. Peningkatan Kesejahteraan Petani
 3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
 Urusan Pemerintahan : Bidang Pangan; Bidang Pertanian

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
I	Risiko Strategis						
R1	Mengusulkan rekrutmen PPL dan POPT	Pertemuan, surat usulan	DKPP	BKPSDM	Desember 2024		
	Melaksanakan pengamatan OPT secara berkala	Pertemuan, surat pemberitahuan	DKPP	POPT dan petani	Desember 2024		
	Melaksanakan verifikasi dan validasi usulan hibah sarana dan prasarana pertanian	Pertemuan, surat edaran	DKPP	Kelompok Tani	Juni 2024	Mei - Juni 2024	
	Melaksanakan sosialisasi SK penetapan LP2B	Pertemuan	DKPP	Kelompok Tani	Desember 2024		

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
	Melaksanakan koordinasi dengan stakeholder terkait (Kelompok Tani, BRI, Kementerian Pertanian, Distributor pupuk bersubsidi)	Pertemuan	DKPP	Kelompok Tani, BRI, Kementerian Pertanian, Distributor pupuk bersubsidi	Desember 2024		
II	Risiko Operasional						
R54	Mensosialisasikan pentingnya lalulintas hewan melalui sistem ISIKHNAS sehingga akan memudahkan penelusuran jika muncul penyakit dari hewan yang baru didatangkan	Surat Edaran, Leaflet/ buku saku, intensif KIE di lapangan	DKPP	Masyarakat peternak, pedagang, petugas, pemangku wilayah	September 2024		
R62	Melakukan pertemuan petugas OPT sebulan 2 kali	Laporan petugas OPT sesuai wilayah kerja	DKPP	POPT dan petani	Desember 2024		
R71	Sosialisasi pentingnya pelaksanaan dan keberlanjutan kegiatan Sekolah Lapang	Pertemuan	DKPP	Penyuluh pertanian, kelompok tani pelaksana	September 2024		
R16	Sosialisasi dan pembinaan pembentukan Usaha Pengelolaan Jasa Alat dan Mesin Pertanian	Pertemuan petani	DKPP	Petani	Desember 2024		
R26	Penyusunan SOP Budidaya tembakau	Pertemuan petani	DKPP	Petani	Juni 2024		
R53	Menambah jangkauan pelayanan di wilayah yang bebatasan langsung dengan daerah lain	Surat Edaran, Leaflet/ buku saku, intensif KIE di lapangan	DKPP	Masyarakat peternak, pedagang, petugas, pemangku wilayah	September 2024		

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
R57	Pengambilan sampel di pasar yang besar dan yang menjual bahan pangan asal hewan yang berasal dari luar daerah	Surat Edaran, Leaflet/ buku saku, intensif KIE di lapangan	DKPP	Peternak, pelaku usaha BPAH, konsumen, masyarakat, pemangku wilayah	September 2024		
R58	Menjadwalkan pengawasan ke pasar desa yang belum terjangkau seperti di wilayah perbatasan kabupaten	Surat Edaran, Leaflet/ buku saku, intensif KIE di lapangan	DKPP	Peternak, Pedagang ternak/ BAH/ BPAH, konsumen, masyarakat, pemangku wilayah	September 2024		
R63	Sosialisasi pelaksanaan kegiatan pelatihan tematik DAK Non Fisik 2024	Pertemuan	DKPP	Penyuluh pertanian	September 2024		
R70	Sosialisasi jadwal pelaksanaan kegiatan sekolah lapang	Pertemuan	DKPP	Penyuluh pertanian, kelompok tani pelaksana	September 2024		
III Risiko Kemitraan							
R73	Penyusunan Indikasi Geografis Kopi Robusta Kabupaten Purworejo	Pengamatan lapang, pertemuan, uji laboratorium, FGD, dokumen	DKPP, BRIN dan MPIG	Petani dan pengolah (prosesor) kopi	Desember 2024		
R74	Pelepasan varietas tembakau unggul lokal	Pengamatan lapang, pertemuan, uji laboratorium, FGD, dokumen	DKPP, BRIN	Petani	Desember 2024		
IV Risiko Fraud/ Kecurangan							
R85	Monitoring dan pengawasan secara berkala selama pelaksanaan pekerjaan konstruksi RPH	Pertemuan, kunjungan dan pengawasan lapangan	DKPP, Konsultan Pengawas	Penyedia Konstruksi	Desember 2024		

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
R75	Sosialisasi pelaksanaan pembangunan jalan usaha tani	Pertemuan	DKPP	Kelompok penerima kegiatan, Fasilitator	Juni 2024	Maret 2024	
R76	Penyusunan RAB pembangunan JUT sesuai analisa teknis	Pertemuan, Musyawarah kelompok	DKPP, Fasilitator	Kelompok penerima kegiatan	September 2024		
R77	Monitoring dan pendampingan pekerjaan fisik JUT secara intensif	Kunjungan lapangan, komunikasi melalui media online	DKPP, Fasilitator	Kelompok penerima kegiatan	September 2024		
R79	Sosialisasi pelaksanaan pembangunan irigasi ATD	Pertemuan	DKPP	Kelompok penerima kegiatan, Fasilitator	September 2024		
R80	Penyusunan RAB pembangunan irigasi ATD sesuai analisa teknis	Pertemuan, musyawarah kelompok	DKPP, Fasilitator	Kelompok penerima kegiatan	September 2024		
R82	Sosialisasi pelaksanaan pembangunan jaringan irigasi	Pertemuan	DKPP	Kelompok penerima kegiatan, Fasilitator	September 2024		
R83	Monitoring dan pendampingan pekerjaan fisik saluran irigasi secara intensif	Kunjungan lapangan, komunikasi melalui media online	DKPP, Fasilitator	Kelompok penerima kegiatan	September 2024		

PURWOREJO, 21 JULI 2024
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN KABUPATEN PURWOREJO



HADI SALSILA, SP., MM.

Pembina Utama Muda / IV c
NIP 196805051997031008

LAMPIRAN 10
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
 DAN PERTANIAN KABUPATEN PURWOREJO
 NOMOR : 500.6.1 / 4815 / 2024
 TANGGAL : 21 Juli 2024
 TENTANG MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN
 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
 KABUPATEN PURWOREJO

RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN

Nama Pemda : Kabupaten Purworejo
 Tahun Penilaian : 2024
 Tujuan Strategis : 1. Pemantapan Ketahanan Pangan
 2. Peningkatan Kesejahteraan Petani
 3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
 Urusan Pemerintahan : Bidang Pangan; Bidang Pertanian

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
I	Risiko Strategis					
R1	Mengusulkan rekrutimen PPL dan POPT	Pertemuan, surat usulan	Kepala DKPP	Desember 2024		
	Melaksanakan pengamatan OPT secara berkala	Pertemuan, surat pemberitahuan	Kepala DKPP	Desember 2024		
	Melaksanakan verifikasi dan validasi usulan hibah sarana dan prasarana pertanian	Pertemuan, surat edaran	Kepala DKPP	Juni 2024	Mei - Juni 2024	
	Melaksanakan sosialisasi SK penetapan LP2B	Pertemuan	Kepala DKPP	Desember 2024		
	Melaksanakan koordinasi dengan stakeholder terkait (Kelompok Tani, BRI, Kementerian Pertanian, Distributor pupuk bersubsidi)	Pertemuan	Kepala DKPP	Desember 2024		

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
	II Risiko Operasional					
R54	Mensosialisasikan pentingnya lalu lintas hewan melalui sistem ISIKHNAS sehingga akan memudahkan penelusuran jika muncul penyakit dari hewan yang baru didatangkan	Surat Edaran, Leaflet/ buku saku, intensif KIE di lapangan	Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	September 2024		
R62	Melakukan pertemuan petugas OPT sebulan 2 kali	Laporan petugas OPT sesuai wilayah kerja	Kepala Bidang Sarana dan Perlindungan Pertanian	Desember 2024		
R71	Sosialisasi pentingnya pelaksanaan dan keberlanjutan kegiatan Sekolah Lapang	Pertemuan	Kepala Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian	September 2024		
R16	Sosialisasi dan pembinaan pembentukan Usaha Pengelolaan Jasa Alat dan Mesin Pertanian	Pertemuan petani	Kepala Bidang Sarana dan Perlindungan Pertanian	Desember 2024		
R26	Penyusunan SOP Budidaya tembakau	Pertemuan petani	Kepala Bidang Sarana dan Perlindungan Pertanian	Juni 2024		
R53	Menambah jangkauan pelayanan di wilayah yang dibatasi langsung dengan daerah lain	Surat Edaran, Leaflet/ buku saku, intensif KIE di lapangan	Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	September 2024		
R57	Pengambilan sampel di pasar yang besar dan yang menjual bahan pangan asal hewan yang berasal dari luar daerah	Surat Edaran, Leaflet/ buku saku, intensif KIE di lapangan	Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	September 2024		
R58	Menjadwalkan pengawasan ke pasar desa yang belum terjangkau seperti di wilayah perbatasan kabupaten	Surat Edaran, Leaflet/ buku saku, intensif KIE di lapangan	Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	September 2024		
R63	Sosialisasi pelaksanaan kegiatan pelatihan tematik DAK Non Fisik 2024	Pertemuan	Kepala Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian	September 2024		

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/ Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
R70	Sosialisasi jadwal pelaksanaan kegiatan sekolah lapang	Pertemuan	Kepala Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian	September 2024		
III	Risiko Kemitraan					
R73	Penyusunan Indikasi Geografis Kopi Robusta Kabupaten Purworejo	Pengamatan lapang, pertemuan, uji laboratorium, FGD, dokumen	Kepala Bidang Sarana dan Perlindungan Pertanian	Desember 2024		
R74	Pelepasan varietas tembakau unggul lokal	Pengamatan lapang, pertemuan, uji laboratorium, FGD, dokumen	Kepala Bidang Sarana dan Perlindungan Pertanian	Desember 2024		
IV	Risiko Fraud/ Kecurangan					
R85	Monitoring dan pengawasan secara berkala selama pelaksanaan pekerjaan konstruksi RPH	Pertemuan, kunjungan dan pengawasan lapangan	Kepala Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian	Desember 2024		
R75	Sosialisasi pelaksanaan pembangunan jalan usaha tani	Pertemuan	Kepala Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian	Juni 2024	Maret 2024	
R76	Penyusunan RAB pembangunan JUT sesuai analisa teknis	Pertemuan, Musyawarah kelompok	Kepala Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian	September 2024		
R77	Monitoring dan pendampingan pekerjaan fisik JUT secara intensif	Kunjungan lapangan, komunikasi melalui media online	Kepala Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian	September 2024		
R79	Sosialisasi pelaksanaan pembangunan irigasi ATD	Pertemuan	Kepala Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian	September 2024		
R80	Penyusunan RAB pembangunan irigasi ATD sesuai analisa teknis	Pertemuan, musyawarah kelompok	Kepala Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian	September 2024		

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
R82	Sosialisasi pelaksanaan pembangunan jaringan irigasi	Pertemuan	Kepala Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian	September 2024		
R83	Monitoring dan pendampingan pekerjaan fisik saluran irigasi secara intensif	Kunjungan lapangan, komunikasi melalui media online	Kepala Bidang Prasarana dan Penyuluhan Pertanian	September 2024		



PURWOREJO, 21 JULI 2024
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERTANIAN KABUPATEN PURWOREJO

HADI SASSILA, SP., MM.
Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 196805051997031008


LAMPIRAN 11
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
 DAN PERTANIAN KABUPATEN PURWOREJO
 NOMOR : 900.6.1 / 4815 / 2024
 TANGGAL : 21 Juli 2024
 TENTANG MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN
 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN
 KABUPATEN PURWOREJO

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVEN) DAN RTP

Nama Pemda : Kabupaten Purworejo
 Tahun Penilaian : 2024
 Tujuan Strategis : 1. Pemanfaatan Ketahanan Pangan
 2. Peningkatan Kesejahteraan Petani
 3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
 Urusan Pemerintahan : Bidang Pangan; Bidang Pertanian

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Ket.	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Ket.
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
			N I H I L							

PURWOREJO, 21 JULI 2024
 KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
 DAN PERTANIAN KABUPATEN PURWOREJO



KHADI SADSILA, SP., MM.
 Pembina Utama Muda / IV c
 NIP. 196805051997031008